

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Waruwu, S.J (2016) pada penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014”, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data Bank Indonesia (BI), data BAPPENAS dan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terdiri dari data kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, data belanja pemerintah dan data investasi dari tahun 1995 sampai tahun 2014. Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan, belanja pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995-2014.

Asrianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap

Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia periode 2007 sampai dengan 2016 berupa data sekunder dan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2016.

Nisbah, F (2018) pada penelitiannya menggunakan data sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan teknik analisis regresi data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian pada “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo dan Langkat” ini bahwa pengangguran memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan pada setiap tahunnya jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas (pelajar dan mahasiswa) terus mengalami peningkatan, namun mereka masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karena mereka masih berada dalam tanggungan orang tua. Faktor selain itu karena terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sementara pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan memiliki hubungan positif.

Susiaturun, E (2018) pada penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016”, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang berkaitan dengan data pertumbuhan penduduk, data pengangguran dan data kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Kesimpulan pada penelitian ini pertumbuhan penduduk dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung dan kemiskinan menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah atau mengalami fluktuasi.

Fadlillah, N *et al.* (2016) dalam penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013” menggunakan analisis data panel dan menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan

penduduk tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Irhamni (2018) dalam penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015” menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 yang meliputi data jumlah penduduk miskin, data pengangguran dan data pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) serta *World Bank*. Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk dan pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif.

Fasholla, R.T (2018) dalam penelitian tentang “Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016” menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Peneliti menggunakan metode analisis data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section* dan menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah dan

jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan berhubungan positif, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan tetapi berhubungan negatif terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

Bayo dalam Asrianti (2017) tidak sedikit yang menganggap kemiskinan sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, nyatanya kemiskinan memiliki sifat yang sangat luas dan juga multidimensional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan, namun jumlah kemiskinan cenderung mengalami peningkatan bertepatan dengan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat.

Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda sehingga memiliki banyak dimensi. Kemiskinan kerap dihubungkan dengan dimensi ekonomi agar lebih mudah dalam mengamati dan mengukurnya, padahal terdapat dimensi-dimensi lain yang memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan, seperti dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, budaya dan yang lainnya. Namun perlu untuk melakukan pengukuran kemiskinan secara multidimensi agar suatu rumusan kebijakan dalam upaya menurunkan kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan (Suryawati dalam Fadlillah. N, 2016).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasarnya berupa makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, kesehatan, pekerjaan, pertanahan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, terbebas dari kriminalisme, dan hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial guna mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

World Bank (2001) mengartikan kemiskinan sebagai “*Poverty is to be hungry, to lack shelter and clothing, to be sick and not cared for, to be illiterate and not schooled*”. Kemiskinan berarti kelaparan, ketiadaan tempat tinggal dan pakaian, menjadi sakit dan tidak dirawat, buta huruf dan tidak sekolah. Dalam bentuk sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, dengan kata lain penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang

disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan meliputi 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, daging, ikan, telur dan susu, kacang-kacangan, sayuran, minyak dan lemak, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan juga kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan meliputi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dalam mengukur Garis Kemiskinan dapat dihitung dengan perhitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Menurut Todaro dalam Fasholla, R.T (2018) ciri-ciri masyarakat miskin yaitu :

- 1) Perbedaan geografis, yaitu jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.
- 2) Perbedaan sejarah, dikarenakan sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
- 3) Perbedaan kekayaan SDA dan kualitas SDM.
- 4) Perbedaan peranan sektor negara dan swasta.
- 5) Perbedaan struktur industri.
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi serta politik negara lain.
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Maipta, I (2014: 29) kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan Struktural atau Buatan (*man made poverty*) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi dan keamanan yang akan menyebabkan kondisi sosial masyarakat menjadi rendah (*underdevelopment trap*) atau tidak mungkin sejahtera.
- 2) Kemiskinan Alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan SDA, sehingga peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil serta tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.
- 3) Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, enggan bekerja keras sehingga etos kerjanya rendah dan tidak disiplin.
- 4) Kemiskinan Absolut merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang biasanya didasarkan pada sejumlah kebutuhan nutrisi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin. *World Bank* dalam Wibowo, M.E (2014) menyebutkan ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- 1) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan serta pendidikan).

- 2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
- 3) Rentan akan guncangan ekonomi dan terkait dengan ketidakmampuan dalam menanggulangnya.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan dalam kegiatan perekonomian suatu daerah yang mengakibatkan bertambahnya hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Sukirno. S, 2011: 9). Peningkatan hasil produksi serta pendapatan masyarakat akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat yang dapat ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik.

Tarigan dalam Suryani, E (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai pertambahan pendapatan masyarakat suatu daerah yang terjadi secara menyeluruh berupa kenaikan pada keseluruhan nilai tambah (*added value*).

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur serta corak dalam kegiatan perekonomian (Sukirno. S, 2011: 423). Pelaksanaan suatu kebijakan dalam pembangunan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan suatu parameter untuk mengetahui apakah pelaksanaan

kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah perlu dilakukan perhitungan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu satu tahun.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional dapat diketahui dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB), dan untuk tingkat daerah dapat diketahui dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan dalam satu periode tertentu yang pada umumnya hanya mengukur pertumbuhan perekonomian di tingkat wilayah provinsi atau kabupaten saja.

Dalam mengukur sebuah kemajuan perekonomian suatu daerah, dapat menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi karena lebih efisien dalam menilai kesejahteraan penduduk disuatu daerah. Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, dapat dilakukan dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk daerah tertentu, atau disebut dengan PDRB rata-rata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan (*current price*) dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi di suatu daerah.
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun acuan dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), berikut perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) :

$$G_t = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- G_t = Pertumbuhan Ekonomi
- PDRB_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun tertentu
- PDRB_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya

Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi sejak pertama kali sudah dikemukakan oleh Adam Smith didalam bukunya yang berjudul “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1776 (Sukirno. S, 2011: 432).

Teori-teori di dalam pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Teori Pertumbuhan Klasik, teori ini dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik yang membagi pengaruh pertumbuhan ekonomi menjadi empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan walaupun teori ini lebih menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.
- 2) Teori Schumpeter, teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dimana pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat inovasi di dalam kegiatan ekonomi.
- 3) Teori Harrod-Domar, teori ini bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka yang panjang.
- 4) Teori Pertumbuhan Neo Klasik, teori ini dinilai sebagai perluasan dari teori Keynes dan teori Harrod-Domar yang melihat persoalan pertumbuhan dari segi permintaan, teori ini menekankan pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui

kenaikan investasi dan bertambah secara terus-menerus sampai pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan.

2.2.3. Pengangguran

Menurut Mankiw. N.G, (2006: 154) pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang paling berat dan dapat mempengaruhi manusia secara langsung. Hal itu dikarenakan saat seseorang kehilangan suatu pekerjaan akan mengakibatkan penurunan standar kehidupan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kecemasan psikologis. Masalah pengangguran kerap diperdebatkan dalam suatu debat politik dan menjadi pembahasan yang sudah tidak asing lagi bagi para politisi bersamaan dengan tawaran kebijakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat membantu menurunkan jumlah pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sukirno, S (2011: 328) membedakan jenis-jenis pengangguran menjadi dua golongan, yang pertama adalah jenis pengangguran yang berdasar kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, dan yang kedua adalah jenis pengangguran yang berdasar kepada ciri-ciri dari pengangguran tersebut.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengangguran Normal atau Pengangguran Friksional merupakan pengangguran yang disebabkan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan sesuai dengan keahliannya.
- 2) Pengangguran Siklikal merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- 3) Pengangguran Struktural merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh adanya perubahan struktur dalam kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran Teknologi merupakan pengangguran akibat dari penggunaan mesin serta kemajuan teknologi.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengangguran Terbuka merupakan pengangguran yang timbul akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja.
- 2) Pengangguran Tersembunyi merupakan pengangguran yang timbul akibat dari jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan.

- 3) Pengangguran Bermusim merupakan pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun yang umumnya terjadi pada sektor pertanian, dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.
- 4) Setengah Menganggur merupakan pengangguran sepenuh waktu atau bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jam kerja normal di Indonesia adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu termasuk golongan setengah menganggur.

2.2.4. Belanja Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto dalam Wibowo, M.E (2014) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Definisi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat 13 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Belanja Daerah dalam Fasholla, R.T (2018), belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam menyusun laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi serta fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja dalam melaksanakan suatu aktifitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu :

- 1) Belanja Administrasi Umum adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang tidak saling berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu :
 - a) Belanja Pegawai adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk orang atau personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas, dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
 - b) Belanja Barang adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - c) Belanja Perjalanan Dinas adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

- d) Belanja Pemeliharaan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- 2) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik adalah semua pengeluaran yang berasal dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :
- a) Belanja Pegawai adalah keseluruhan biaya yang berasal dari pemerintah daerah untuk orang atau personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktifitas, dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang sifatnya variabel.
 - b) Belanja Barang adalah keseluruhan biaya dari pemerintah daerah yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - c) Belanja Perjalanan adalah keseluruhan biaya dari pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - d) Belanja Pemeliharaan adalah keseluruhan biaya dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.
- 3) Belanja Modal didefinisikan sebagai keseluruhan biaya yang berasal dari pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang kemudian akan

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal terdiri dari :

a) Belanja Publik merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa serta pembelian mobil ambulans.

b) Belanja Aparatur merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi akan dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh dari belanja aparatur yaitu pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan serta pembangunan rumah dinas.

4) Belanja Transfer merupakan suatu pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa ada harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Belanja transfer terdiri atas pembayaran :

a) Angsuran Pinjaman

b) Dana Bantuan

c) Dana Cadangan

5) Belanja Tak Tersangka didefinisikan sebagai keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang tidak tersangka serta kejadian-kejadian luar biasa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Belanja, mendefinisikan belanja daerah sebagai suatu kewajiban daerah yang mencakup keseluruhan biaya yang berasal dari kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana dan dilakukan dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diterima pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung didefinisikan sebagai belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yaitu :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Subsidi
- d) Belanja Hibah
- e) Belanja Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.

2.3. Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen

2.3.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno, S dalam Waruwu, S.J (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Dalam mengukur pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto saja, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana distribusi pendapatan menyebar kepada lapisan masyarakat dan pihak-pihak yang sudah menikmati hasilnya. Penurunan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah akan berakibat pada keterbatasan kualitas pendapatan penduduk, yang pada akhirnya akan membuat pola kebutuhan pokoknya menjadi berubah ke barang-barang dengan harga yang lebih rendah dengan kuantitas lebih sedikit.

Fane dan War dalam Maipita, I (2014: 63) jika pertumbuhan yang dapat meningkatkan *return* terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi penduduk miskin semakin besar, maka akan semakin besar pula kemungkinan dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti dalam Asrianti (2017) kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya tingkat pendapatan tahunan seseorang disuatu daerah tidak lagi mampu untuk memenuhi rata-rata pengeluaran terendah yang dibutuhkan oleh seseorang guna menjalani

kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang menjalani kehidupan dibawah rata-rata pengeluaran tersebut termasuk kedalam golongan miskin. Berkembangnya perekonomian suatu daerah akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang jika tersalurkan dengan baik diantara masyarakat akan berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting untuk menurunkan angka kemiskinan disuatu daerah.

Kuznet dalam Nisbah, F (2018) terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kemiskinan pada tahap awal pelaksanaan pembangunan ekonomi dan terjadi penurunan kemiskinan pada tahap akhir pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

H_1 : Diduga PE memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap JK

2.3.2. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang seringkali dijumpai di sebagian masyarakat suatu daerah, karena pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang saling berhubungan dan sudah sangat melekat pada masyarakat yang memiliki perekonomian rendah.

Arsyat dalam Asrianti (2017) menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tidak meratanya distribusi pendapatan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut sebagian besar dari mereka yang

tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan penuh, mereka akan terus-menerus berada diantara kelompok masyarakat miskin, sedangkan mereka yang memiliki pekerjaan tetap serta penghasilan yang cukup umumnya termasuk diantara kelompok masyarakat menengah atas.

Menurut Todaro dalam Nisbah, F (2018) pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Rendahnya kualitas hidup masyarakat dijabarkan ke dalam rendahnya tingkat pendapatan, tempat tinggal tidak memadai, kesehatan yang buruk, pendidikan terbatas, rendahnya angka fertilitas, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat serta rendahnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Rendahnya kesempatan dalam memperoleh suatu pekerjaan berarti pengangguran. Tingginya angka pengangguran disuatu daerah akan berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga akan jatuh miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan.

H₂ : Diduga JP memiliki pengaruh signifikan positif terhadap JK

2.3.3. Hubungan Belanja Pemerintah Dengan Kemiskinan

Menurut Noor dalam Waruwu, S.J (2016) belanja pemerintah dari sisi ekonomi publik ditujukan untuk manajemen pemenuhan kebutuhan publik dengan pemerintah sebagai pihak yang berperan untuk menjalankan tugas serta fungsi daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah.

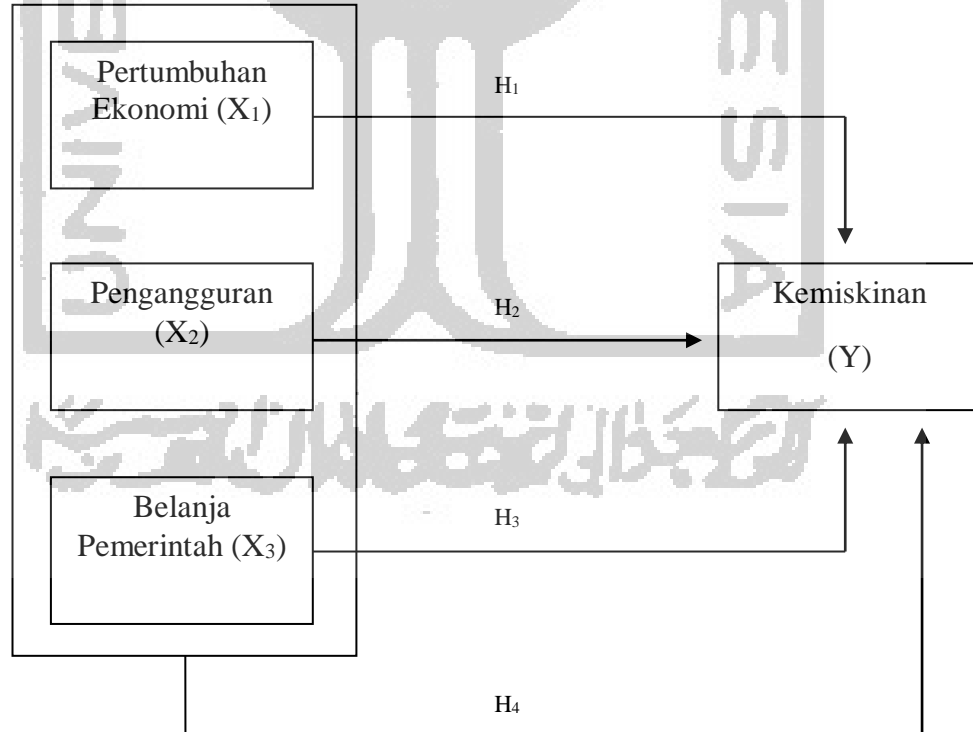
Amalia dalam Irhamni (2018) pengeluaran yang terdapat pada belanja pemerintah menjadi salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

H₃ : Diduga BP memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap JK

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disertai dengan kerangka pemikiran yang menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



Untuk mengupayakan pengurangan kemiskinan, perlu untuk mengetahui penyebab apa saja yang berdampak pada kemiskinan. Penyebab-penyebab yang berdampak terhadap Kemiskinan pada penelitian ini adalah : Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah. Dengan mengetahui penyebab apa saja yang berdampak terhadap Kemiskinan, peneliti berharap dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program yang tepat yaitu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam suatu penelitian diartikan sebagai suatu dugaan yang belum terbukti dan masih lemah kebenarannya sehingga perlu untuk diuji. Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini :

- 1) Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
- 2) Diduga Pengangguran memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
- 3) Diduga Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

- 4) Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.

